

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam rangka itu, Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Sehubungan dengan hal tersebut, setiap instansi pemerintah wajib membuat pertanggungjawaban berupa LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkep disusun dengan memperhatikan tingkat pencapaian sasaran dan pencapaian kegiatan dengan berorientasi pada pencapaian visi, misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

## 1.2. Gambaran Umum

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkep dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkep ( Lembaran Daerah Kabupaten pangkep Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9 ), mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkep terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris Badan membawahi
  - i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - ii. Sub Bagian Pelaporan dan Perencanaan
  - iii. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pengarusutamaan Gender membawahi
  - i. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender
  - ii. Sub Bidang Advokasi dan KIE
- d. Bidang Keluarga Berencana membawahi
  - i. Sub Bidang Keluarga Berencana
  - ii. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi

- e. Bidang Keluarga Sejahtera membawahi
  - i. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
  - ii. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga
- f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak membawahi
  - i. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan
  - ii. Sub Bidang Perlindungan Anak
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Agar pembangunan lima tahun ke depan tidak berjalan sendiri tanpa arah maka diperlukan satu arahan dan persamaan visi yang mengarah pada tindakan penuh kehati-hatian dan sikap arif dari semua pihak agar terjalin pembangunan terkoordinasi dan berdayaguna termasuk pembangunan yang dijalankan Badan pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan instansi lainnya.

### **1.3. Tugas dan Fungsi**

Tugas pokok Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkep untuk melaksanakan kewenangan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPPKB mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, Keuangan, Kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan unit pelaksana teknis Badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **1.4. Keadaan Pegawai**

- a. Berdasarkan kualifikasi pendidikan;

- SD : - Orang
- SMP : 1 Orang
- SMA : 48 Orang
- D I : 1 Orang
- D II : - Orang
- D III : 3 Orang
- S 1 : 39 Orang
- S 2 : 1 Orang

- b. Berdasarkan Pangkat/Golongan;

- Golongan I : 1 Orang
- Golongan II : 39 Orang
- Golongan III : 43 Orang
- Golongan IV : 10 Orang

- c. Jumlah pejabat struktural;

- Eselon II : 1 Orang
- Eselon III : 4 Orang

- Eselon IV : 10 Orang

d. Jumlah jabatan fungsional.

- Penyuluh KB : 69 Orang

### **1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana**

Lokasi kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkep berada di Jl. H. M. Arsyad B No. 7. Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk mendukung pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkep. Nilai aset yang dikelola Per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 6.336.564.047,-

Tabel 1

**REKAPITULASI BUKU INVENTARIS**

**Provinsi** : PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**Kab./Kota** : KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
**Bidang** : Bidang Sosial  
**Unit Organisasi** : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB  
**Sub Unit Organisasi** : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
	<b>ASET TETAP</b>	<b>6,336,564,047.00</b>
01	<b>Tanah</b>	0.00
02	<b>Peralatan dan Mesin</b>	5,227,925,967.00
02	Alat-alat Besar	0.00
03	Alat-alat Angkutan	2,983,911,967.00
04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0.00
05	Alat Pertanian	3,850,000.00
06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	461,320,000.02
07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	402,809,999.98
08	Alat-alat Kedokteran	1,004,209,000.00
09	Alat Laboratorium	371,825,000.00
10	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	0.00
03	<b>Gedung dan Bangunan</b>	986,658,080.00
11	Bangunan Gedung	986,658,080.00
12	Monumen	0.00
04	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	0.00
13	Jalan dan Jembatan	0.00
14	Bangunan Air/Irigasi	0.00
15	Instalasi	0.00
16	Jaringan	0.00
05	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	121,980,000.00
17	Buku dan Perpustakaan	121,980,000.00
18	Barang Bercorak Kebudayaan	0.00
19	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0.00
06	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	0.00
	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>33,775,000.00</b>
07	<b>Aset Lainnya</b>	33,775,000.00
01	Aset Lainnya	0.00
21	Aset Kondisi Rusak Berat	33,775,000.00
22	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0.00
23	Aset Renovasi	0.00
24	Aset Tidak Berwujud	0.00

## 1.6. Sistematika

**Ringkasan Eksekutif**, merupakan gambaran menyeluruh secara singkat mengenai penyelenggaraan kinerja 1 (satu) tahunan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkep.

**Bab I Pendahuluan**, pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, struktur organisasi tugas-tugas yang dibebankan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

**Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**, pada bab ini diuraikan gambaran singkat perencanaan dan perjanjian kinerja pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkep serta kaitannya dengan capaian visi dan misi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkep.

**Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2014, dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategik untuk Tahun 2014.

**Bab IV Penutup**, menjelaskan menyeluruh dari LAKIP Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2014, serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. Perencanaan Program dan Kegiatan**

Perencanaan program dan kegiatan dibuat berdasarkan pada Rencana Strategik Badan Pemberdayaan Perempuan dan ditetapkan dengan mengacu kepada rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Pangkep. Renstra yang disusun dimaksudkan sebagai alat kendali dan pedoman umum bagi manajemen Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, melaksanakan pembangunan untuk jangka 5 (lima) tahun dan Tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap unit kerja yang menjadi tulang punggung pelaksanaan kegiatan.

Berlandaskan hasil rumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang telah disusun berdasarkan target capaian setiap tahunnya, maka perlu adanya sinergitas dengan Renstra SKPD.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) mempunyai peran dan posisi penting baik dalam upaya mensukseskan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Pangkep maupun pencapaian tugas pokok dan fungsi BPPKB Kabupaten Pangkep.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana kabupaten Sinjai mempunyai rencana strategik



yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima ) tahun yaitu tahun 2011 s.d. 2015.

#### A. VISI

“ Perempuan dan laki - laki memang beda tetapi tidak untuk dibeda - bedakan dan semua keluarga ikut Keluarga Berencana ( KB ) ”.

#### B. MISI

- i. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pendewasaan usia perkawinan;
- ii. Mengupayakan peran serta masyarakat dalam pengaturan kelahiran;
- iii. Peningkatan kesejahteraan dan Memperkuat Ketahanan keluarga;
- iv. Mendorong kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

#### C. TUJUAN

- i. Memperkokoh Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan KB;
- ii. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dan KB;
- iii. Meningkatkan Akses Pemberdayaan Perempuan dan KB di berbagai masyarakat dalam keluarga sejahtera;
- iv. Meningkatkan kepedulian dan peran serta tokoh formal dan informal serta partisipasi masyarakat dalam pengembangan kualitas keluarga dengan harapan masa depan yang lebih baik agar timbul rasa tentram, serta kesejahteraan lahir batin dalam jumlah anak yang ideal;

- v. Meningkatkan akses informasi, pengembangan dan Pembinaan yang berorientasi pada keluarga berencana, kemiskinan, kesetaraan gender dan kerentanan sosial;
- vi. Pembinaan kemandirian dan peningkatan cakupan serta mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga, terutama yang diselenggarakan oleh institusi masyarakat di daerah perkotaan dan pedesaan dalam rangka mengembangkan keluarga kecil berkualitas;
- vii. Peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga dengan memperhatikan kelompok usia penduduk berdasarkan siklus hidup yaitu mulai dari janin dalam kandungan sampai dengan lansia dalam rangka pembangunan;
- viii. Keluarga kecil berkualitas serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, pembinaan remaja, peningkatan kualitas hidup lansia dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- ix. Peningkatan pengetahuan pemahaman, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak – hak reproduksi guna meningkatkan derajat Kesehatan reproduksinya dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga untuk mendukung upaya kualitas generasi mendatang.

#### D. SASARAN

- i. Pembangunan Daerah ber-perspektif gender;
- ii. Pengembangan kemitraan sejajar yang harmonis antara perempuan dan laki – laki;

- iii. Pengembangan kemitraan dan jaringan kerja;
- iv. Pengukuran Indikator Kinerja;
- v. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dan Teknologi;
- vi. Perluasan kesempatan pendidikan bagi anak perempuan;
- vii. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam Program KB;
- viii. Menata kembali Pengelolaan Program KB;
- ix. Memperkuat SDM Operasional Program KB;
- x. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui Pelayanan KB.

## **2.2. Perjanjian Kinerja**

Dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi.

Untuk mencapai sasaran strategis instansi ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU ini diukur dengan beberapa indikator kegiatan untuk mencapai indikator sasaran strategis. Sasaran strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkep ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Sasaran strategis Badan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkep dan rencana pencapaiannya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas Administrasi Perkantoran, Sarana & Prasarana Aparatur.
  - i. Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran;
  - ii. Kepuasan Pegawai Terhadap Penyediaan Sarana & Prasarana.
- b. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan.
  - i. Laporan Tepat Waktu.
- c. Terkendalinya Jumlah Penduduk Melalui Keluarga Berencana.
  - i. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I;
  - ii. Cakupan Peserta KB Aktif;
  - iii. Cakupan Peserta KB Baru;
  - iv. Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKB - Sub PPKBD);
  - v. Bina Keluarga Balita (BKB);
  - vi. Bina Keluarga Remaja (BKR);
  - vii. Bina Keluarga Lansia (BKL).
- d. Pembangunan Peranan Perempuan & Kesetaraan Gender.
  - i. Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Pemerintah;
  - ii. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan;
  - iii. Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur;
  - iv. Terlaksananya Pembinaan P2WKSS;
  - v. Terlaksananya Gerakan Sayang Ibu;

## 2.3. Indikator Kinerja Utama

Tabel 2

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Administrasi Perkantoran, Sarana & Prasarana Aparatur	Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran
		Kepuasan Pegawai Terhadap Penyediaan Sarana & Prasarana	Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Penyediaan Sarana & Prasarana
2	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Laporan Tepat Waktu	Persentase Ketepatan Pembuatan Laporan
3	Terkendalnya Jumlah Penduduk Melalui Keluarga Berencana	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Jumlah KK Pra Sejahtera dan KS I
		Cakupan Peserta KB Aktif	Persentase Cakupan Peserta KB Aktif
		Cakupan Peserta KB Baru	Persentase Cakupan Peserta KB Baru
		Rata – rata Jumlah Anak Per Keluarga	Jumlah Rata – rata Anak Pada Setiap Keluarga
		Sosialisasi Penanggulangan Narkoba dan HIV/ AIDS	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Narkoba dan HIV/ AIDS
		Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKB - Sub PPKBD)	Jumlah Kelompok Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKB - Sub PPKBD)
		Kelompok UPPKS	Jumlah Kelompok UPPKS
		Kelompok PIK Remaja	Jumlah Kelompok PIK Remaja
		Bina Keluarga Balita Paripurna	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita Paripurna
		Bina Keluarga Remaja Paripurna	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja Paripurna
		Bina Keluarga Lansia Paripurna	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia Paripurna
4	Pembangunan Peranan Perempuan & Kesetaraan Gender	Pembentukan P2TP2A	Jumlah Organisasi Yang Dibentuk
		Terlaksananya Sosialisasi KDRT dan Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT	Jumlah Kegiatan Sosialisasi KDRT dan Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT
		Sosialisasi Pengarusutamaan Gender	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender
		Terlaksananya Keterampilan untuk Kelompok Usaha Perempuan	Jumlah Kegiatan Pelatihan Keterampilan untuk Kelompok Usaha Perempuan
		Terlaksananya Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha	Jumlah Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha
		Terlaksananya Pembinaan P2WKSS	Jumlah Kegiatan Pembinaan P2WKSS
		Terlaksananya Gerakan Sayang Ibu	Jumlah Kegiatan Gerakan Sayang Ibu

## 2.4. Rencana Kerja Tahunan

**Tabel 3**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Administrasi Perkantoran, Sarana & Prasarana Aparatur	Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	82.50%
		Kepuasan Pegawai Terhadap Penyediaan Sarana & Prasarana	85.50%
2	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Laporan Tepat Waktu	95.00%
3	Terkendalinya Jumlah Penduduk Melalui Keluarga Berencana	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	24.020 KK
		Cakupan Peserta KB Aktif	100%
		Cakupan Peserta KB Baru	100%
		Rata – rata Jumlah Anak Per Keluarga	2.1
		Sosialisasi Penanggulangan Narkoba dan HIV/ AIDS	1 Kegiatan
		Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKB - Sub PPKBD)	430
		Kelompok UPPKS	80 Kelompok
		Kelompok PIK Remaja	28 Kelompok
		Bina Keluarga Balita Paripurna	15 Kelompok
		Bina Keluarga Remaja Paripurna	13 Kelompok
		Bina Keluarga Lansia Paripurna	10 Kelompok
4	Pembangunan Peranan Perempuan & Kesetaraan Gender	Pembentukan P2TP2A	1 Organisasi
		Terlaksananya Sosialisasi KDRT dan Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT	1 Kegiatan
		Sosialisasi Pengarusutamaan Gender	1 Kegiatan
		Terlaksananya Keterampilan untuk Kelompok Usaha Perempuan	1 Kegiatan
		Terlaksananya Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha	1 Kegiatan
		Terlaksananya Pembinaan P2WKSS	1 Kegiatan
		Terlaksananya Gerakan Sayang Ibu	1 Kegiatan

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA 2014**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang berisi perwujudan yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan sebagai alat untuk menilai kinerja organisasi. Lakip menjadi kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi.

Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi BPPKB perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Formulir Pengukuran Sasaran.

#### **3.1. Pengukuran Kinerja**

Adapun indikator yang menjadi Pengukuran Kinerja Kegiatan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

##### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Rencana Anggaran : Rp. 236.815.352,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 217.188.735,-
- Capaian Target : 91,71 %

##### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- Rencana Anggaran : Rp. 1.333.093.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 1.270.460.734,-
- Capaian Target : 95,30 %

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Rencana Anggaran : Rp. 6.930.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 6.930.000,-
- Capaian Target : 100 %

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Rencana Anggaran : Rp. 13.500.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 13.500.000,-
- Capaian Target : 100 %

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

▣ Penyusunan RKA SKPD

- Rencana Anggaran : Rp. 7.100.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 6.800.000,-
- Capaian Target : 95,77 %

6. Program Keluarga Berencana

▣ Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

- Rencana Anggaran : Rp. 50.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 49.335.000,-
- Capaian Target : 98,67 %

▣ Pelayanan KIE

- Rencana Anggaran : Rp. 12.800.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 0,-
- Capaian Target : 0.00 %



▣ Pembinaan Keluarga Berencana

- Rencana Anggaran : Rp. 10.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 10.000.000,-
- Capaian Target : 100 %

▣ Pemuktahiran Data Keluarga

- Rencana Anggaran : Rp. 25.500.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 19.120.000,-
- Capaian Target : 74.98 %

7. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

▣ Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

- Rencana Anggaran : Rp. 12.550.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 12.365.000,-
- Capaian Target : 98,53 %

8. Program pelayanan Kontrasepsi

▣ Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB bersama TKBK

- Rencana Anggaran : Rp. 17.400.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 17.315.000,-
- Capaian Target : 99,51 %

▣ Pelayanan KB melalui Momentum TMKK, Bhayangkara, PKK - KB – KES

- Rencana Anggaran : Rp. 17.400.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 14.640.000,-
- Capaian Target : 84,14 %

9. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

▣ Orientasi Bagi PPKBD dan Sub PPKBD

- Rencana Anggaran : Rp. 12.550.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 12.315.000,-
- Capaian Target : 98,13 %

10. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

▣ Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan

- Rencana Anggaran : Rp. 12.550.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 12.545.000,-
- Capaian Target : 99,96 %

11. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

▣ Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan & Perlindungan Anak

- Rencana Anggaran : Rp. 11.110.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 10.865.000,-
- Capaian Target : 97,79 %

▣ Pelaksanaan Sosialisasi Yang Berhubungan Dengan Perempuan dan Anak

- Rencana Anggaran : Rp. 7.400.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 7.400.000,-
- Capaian Target : 100 %

## 12. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

### ▣ Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

- Rencana Anggaran : Rp. 15.600.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 15.590.000,-
- Capaian Target : 99,94 %

### ▣ Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

- Rencana Anggaran : Rp. 170.500.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 168.700.500,-
- Capaian Target : 98,94 %

### ▣ Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

- Rencana Anggaran : Rp. 10.400.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 10.350.000,-
- Capaian Target : 99,52 %

## 13. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

### ▣ Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha

- Rencana Anggaran : Rp. 13.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 12.650.000,-
- Capaian Target : 97,31 %

#### 14. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

##### ▣ Pembinaan P2WKSS

- Rencana Anggaran : Rp. 26.440.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 26.434.500,-
- Capaian Target : 99,98 %

##### ▣ GSI (Gerakan Sayang Ibu)

- Rencana Anggaran : Rp. 26.440.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 26.434.500,-
- Capaian Target : 99,98 %

### 3.2. Pengukuran Pencapaian Sasaran ( PPS ) Tahun 2014

Berdasarkan Indikator Pengukur di dalam Pencapaian Sasaran maka untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4**

NO	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2013	Kinerja Tahun 2014		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Pembentukan P2TP2A	100%	1 Organisasi	1 Organisasi	100.00%
2	Terlaksananya Pembinaan P2WKSS	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%
3	Terlaksananya Gerakan Sayang Ibu	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%
4	Terlaksananya Sosialisasi KDRT dan Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%
5	Sosialisasi Pengarusutamaan Gender	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%
6	Terlaksananya Keterampilan Untuk Kelompok Usaha Perempuan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%
7	Terlaksananya Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%
8	Sosialisasi Penanggulangan Narkoba dan HIV/ AIDS	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%
9	Rata - rata Jumlah Anak Per keluarga	100%	2.1	2.1	100.00%
10	Cakupan Peserta KB Baru	90%	100.00%	93.67%	93.67%
11	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	102%	24.020 KK	22.824 KK	105.24%
12	Cakupan Akseptor Aktif	115%	100.00%	113.04%	113.04%
13	Kelompok UPPKS	97.30%	80	74	92.50%
14	Kelompok PIK Remaja	71.40%	28	24	85.71%
15	Bina Keluarga Balita Paripurna	200%	15	11	73.33%
16	Bina Keluarga Remaja Paripurna	42%	13	5	38.46%
17	Bina Keluarga Lansia Paripurna	50%	10	3	30.00%
18	Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD - Sub PPKBD)	99%	430	423	98.37%

Dari table diatas dapat dilihat beberapa capaian sasaran tahun 2014 mencapai 100% bahkan lebih dan tetap stabil dibandingkan dengan capaian sasaran tahun 2013, namun masih ada beberapa capaian sasaran yang belum sesuai harapan diantaranya :

1. Cakupan Peserta KB Baru	93.67%
2. Kelompok UPPKS	92.50%
3. Kelompok PIK Remaja	85.71%
4. Bina Keluarga Balita Paripurna	73.33%
5. Bina Keluarga Remaja Paripurna	38.46%
6. Bina Keluarga Lansia Paripurna	30.00%
7. Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD - Sub PPKBD)	98.37%

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Dana Kelompok Pemberdayaan Ekonomi Kurang
2. Kurangnya Tenaga Penyuluh di Lapangan Idealnya 1 Orang/ Kelurahan
3. Keakuratan Data di Lapangan Masih Belum Sempurna

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkep Tahun 2014, antara lain :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan Sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkep ( Lembaran Daerah Kabupaten pangkep Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9 ) telah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya aparatur yang dimiliki yang tentunya tetap mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit organisasi dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkep. Selain itu, pelaksanaan pelayanan aparatur maupun pelayanan masyarakat yang melekat pada tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana juga tetap mengupayakan pada pemenuhan kebutuhan stakeholder lembaga ini.
2. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban diperoleh dari laporan kinerja masing-masing bidang dalam lingkup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkep yang melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategik. Penetapan sasaran strategik ini mengacu pada pemenuhan tujuan, misi dan visi Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkep sebagaimana telah disepakati dalam Rencana Strategik Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkep Tahun 2010 - 2015

3. Dalam hal pencapaian sasaran yang ditetapkan dapat terlihat bahwa tidak seluruhnya dapat mencapai kinerja yang diharapkan. Beberapa pokok permasalahan yang menjadi kendala pencapaian kinerja sasaran strategik Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangkep terutama disebabkan karena keterbatasan – keterbatasan baik pendanaan maupun sumber daya manusianya. Namun untuk tahun-tahun mendatang hal tersebut akan diupayakan untuk memperkecil kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kinerja yang ingin dicapai, tentunya dengan mengacu kepada sasaran dan program prioritas.